

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori NGO (*Non Governmental Organization*)

2.1.1.1 Pengertian NGO (*Non Governmental Organization*)

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 1 ayat 1, NGO adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Praya (2009) NGO merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. NGO merupakan sebuah organisasi yang bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara

Menurut Nugroho (2001) NGO merupakan suatu lembaga, kelompok, atau organisasi yang aktif dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan terutama pada lapisan masyarakat bawah.

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa NGO (*Non Governmental Organization*) merupakan sebuah organisasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih peka terhadap suatu perkembangan.

2.1.1.2 Ciri-ciri NGO (*Non Governmental Organization*)

Adapun ciri-ciri NGO (*Non Governmental Organization*) menurut Praja (2009) adalah sebagai berikut :

1. Organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara;
2. Dalam melakukan kegiatannya, organisasi ini tidak berorientasi pada keuntungan;

3. Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi lainnya.

2.1.1.3 Fungsi NGO (*Non Governmental Organization*)

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.1.1.4 Peran NGO (*Non Governmental Organization*)

Dalam era otonomi daerah, NGO memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu menggali potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Karsidi (2001) Peran NGO dalam otonomi daerah dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Peranan Makro Dalam otonomi daerah peranan makro yang dapat dilakukan NGO adalah berusaha menjaga independensi dan mengembangkan kemandirian organisasi. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cara:
 - Mendirikan kembali lembaga-lembaga independen di berbagai level daerah

- Mencoba mengembangkan mekanisme kerja yang mengarah pada fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintah
 - Menyebarkan (dissemination) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang dihadapi
2. Peranan Mikro Peranan mikro yang dapat dilakukan NGO dalam era otonomi daerah yaitu memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah, serta mengelola sumber daya disekitarnya menuju kemandirian ekonomi lokal. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cara:
- Mengembangkan daya saing
 - Membantu pelaku ekonomi rakyat melepaskan diri dari isolasi yaitu dengan masuk ke dalam jaringan pasar
 - Mengembangkan kemandirian kelembagaan

Menurut Menteri Dalam Negeri (2009) NGO baik yang terlibat secara langsung (Business Development Service) atau yang tidak terlibat langsung memiliki peran besar dalam 2 kategori, yaitu:

1. Pemberdayaan pelaku usaha sebagai produsen Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengorganisasian dan pendampingan dalam klaster seperti manajemen, peningkatan kualitas, dan pemasaran.
2. Advokasi yang dilakukan NGO seperti penyadaran akan hak dan kontrol atas kebijakan pemerintah daerah yang merugikan pelaku usaha.

Menurut Willis (2005) peran-peran yang dilakukan NGO khususnya dalam pembangunan di masyarakat golongan bawah berorientasi atau mengacu pada:

1. Kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan
2. Bantuan darurat
3. Pengembangan pendidikan
4. Partisipasi dan pemberdayaan
5. Swasembada
6. Advokasi
7. Jaringan

NGO baik yang terlibat secara langsung (Business Development Service) atau yang tidak terlibat langsung memiliki peran besar dalam 2 kategori, yaitu (Menteri Dalam Negeri 2009):

1. Pemberdayaan pelaku usaha sebagai produsen Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengorganisasian dan pendampingan dalam kluster seperti manajemen, peningkatan kualitas, dan pemasaran.
2. Advokasi.

Advokasi yang dilakukan NGO seperti penyadaran akan hak dan kontrol atas kebijakan pemerintah daerah yang merugikan pelaku usaha. Menurut Willis (2005) peran-peran yang dilakukan NGO khususnya dalam pembangunan di masyarakat golongan bawah berorientasi atau mengacu pada:

- a. Kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan
- b. Bantuan darurat
- c. Pengembangan pendidikan
- d. Partisipasi dan pemberdayaan
- e. Swasembada
- f. Advokasi
- g. Jaringan

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa NGO memiliki peran sebagai berikut.

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.1.1.5 Dampak NGO (*Non Governmental Organization*)

Menurut Ismawan (2003) Dari peran yang dilakukan NGO tersebut membawa peran yang positif. Berikut merupakan dampak dari positif dari keberadaan NGO:

1. Dampak Sosial

Melalui pengetahuan (knowledge) yang diberikan oleh NGO kepada masyarakat, diharapkan wawasan pemikiran masyarakat semakin meningkat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup. Peningkatan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dapat melalui dua jalur, yaitu jalur langsung dan tidak langsung. Peningkatan pengetahuan secara langsung terjadi apabila masyarakat mendapatkan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan sebagainya. Sedangkan peningkatan pengetahuan secara tidak langsung terjadi sejalan dengan terintegrasinya masyarakat dalam suatu kelompok swadaya. Melalui peran yang dilakukan NGO, intervensi pembinaan dapat membantu pemecahan permasalahan sosial yang terdapat dalam kelompok. Akibatnya penanganan masalah tersebut dapat dilakukan secara tepat sasaran dan lebih tuntas. Di samping itu, interaksi yang intensif dapat menyebabkan terjadinya proses transformasi sosial.

2. Dampak Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, intervensi pembinaan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan pemupukan modal. Selama ini faktor tidak berhasilnya masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya adalah masyarakat tidak mampu melakukan pemupukan modal yang dapat digunakan sebagai pengembangan usaha. Dengan sistem kelompok, modal yang kecil dari setiap masyarakat dapat dikembangkan dan dapat dipergunakan sebagai modal usaha. Di samping itu, dengan adanya modal yang terkumpul dapat mengundang partisipasi dana yang lebih besar dari pihak ketiga. Kemampuan permodalan kelompok yang semakin

bertambah memberikan peluang semakin besar untuk mengembangkan usaha produktif.

3. Dampak Kemasyarakatan

Proses interaksi di dalam kelompok semakin meningkatkan wawasan pemikiran. Adanya kelompok sebagai wadah aktualisasi masyarakat menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Kesadaran untuk turut berperan aktif dalam kegiatan kelompok mempunyai dampak lebih lanjut, yaitu adanya kesediaan masyarakat atau kelompok untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang ditawarkan pemerintah. Proses pengembangan kemandirian dan kesadaran berpartisipasi telah menjembatani kesenjangan sosial di tingkat lokal. Dengan menyempitnya kesenjangan sosial berarti stabilitas sosial politik pun dapat terus berlanjut.

2.1.1.6 NGO (*Non Governmental Organization*) dalam Pembangunan Masyarakat

NGO merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat sipil (*civil society*). Selain itu, NGO juga dapat dikatakan sebagai bentuk gerakan sosial masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pelanggaran HAM, lingkungan hidup, dll. Penggiat NGO tentu juga berasal dari masyarakat yang memiliki ketertarikan dan keterampilan pada isu-isu yang menjadi perhatian NGO tersebut. Mereka secara terbuka mengajak masyarakat lain untuk turut peduli pada isu yang diangkat serta memfasilitasi masyarakat yang ingin berdonasi. Oleh sebab itulah, kegiatan utama NGO banyak dicirikan dengan pelayanan sukarela (*voluntary service*) dan penggalangan bantuan amal (*charitable donation*).

Adapun bidang-bidang yang menjadi perhatian NGO beraneka macam, namun peran NGO dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

1. *Implementer*

NGO dengan peran *implementer* yang berfokus pada pemberian jasa dan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contoh layanan tersebut meliputi perawatan kesehatan atau pertolongan tanggap darurat.

2. *Catalyst*

NGO dengan peran *catalyst* dapat diidentifikasi dari kemampuan NGO dalam memelopori pemikiran serta gagasan mengenai perubahan sosial. Contoh kegiatan NGO dengan peran *catalyst* di antaranya advokasi atau kampanye kesetaraan gender. Melalui aksi tersebut diharapkan NGO mampu menyadarkan masyarakat akan suatu isu serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

3. *Partner*

Peran ketiga, NGO sebagai *partner* merefleksikan hubungan kerjasama antara NGO dengan pemerintah, lembaga pendonor, atau lembaga-lembaga swasta. NGO dan lembaga-lembaga ini mengadakan program-program yang memiliki tujuan sosial bagi masyarakat.

NGO sebagai agen pergerakan sosial dalam masyarakat telah hadir pada awal abad ke-20. Salah satu perintis NGO di tingkat internasional adalah *Save The Children*. Ketika didirikan oleh Edlntyne Jebb pada tahun 1919 di Inggris, SCF berfokus untuk membantu anak-anak korban Perang Dunia I dan II serta krisis *Great Depression*. Gerakan SCF dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kini, SCF menjadi salah satu NGO yang memberikan perhatian serta bantuan yang besar dalam menyelesaikan masalah anak-anak di seluruh dunia. Selain SCF, masih banyak NGO internasional lainnya yang memiliki pengaruh besar di antaranya Amnesty International yang bergerak di bidang hak asasi manusia serta *Greenpeace* di bidang lingkungan hidup.

Menurut Dzikri (2015) Ada banyak sekali NGO yang telah memberikan kontribusi positif bagi negeri. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) adalah salah satunya. NGO ini mempunyai dedikasi yang tinggi dalam menyelidiki dan mengungkap kasus korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan atau swasta di

tingkat daerah hingga nasional. Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh ICW mendapatkan penghargaan Honorable Mention dalam *Allard Prize Integrity* 2015.

2.1.1.7 NGO (*Non Governmental Organization*) sebagai *Social Partner*

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah baik daerah maupun pusat membutuhkan peran partisipasi masyarakat dalam membangun Negara dan bangsa. Partisipasi menurut H.A.R. Tilaar (2009:287) adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat berkenan dengan keterlibatan masyarakat dalam semua proses pembangunan (memberikan kontribusi dalam setiap tahap pembangunan).

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003:5) kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Pola kemitraan menurut Ambar Teguh Sulistiyani, dibedakan sebagai berikut.

1. *Pseudo Partnership* atau kemitraan semu. Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya;
2. *Mutualism Partnership* atau kemitraan mutualistik, yaitu persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yang mana untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal;
3. *Conjugation Partnership* atau kemitraan peleburan dan pengembangan, yaitu kemitraan yang mencakup organisasi-organisasi, agen-agen, kelompok, atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan

usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat menggunakan model ini sebagai pelaksanaan kemitraan.

Kemudian faktor-faktor yang mendorong kemitraan atau *social partner* NGO antara lain:

1. *Networking/Jaringan*: Networking atau jaringan merupakan suatu kombinasi kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan, yang harus dilakukan dalam urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas dapat diselesaikan. Urutan-urutan kegiatan tersebut dilakukan secara logis, yaitu mulai dari pelaksanaan pembinaan sampai dengan kegiatan lainnya terselesaikan.
2. *Cooperation*: Cooperation adalah poin penting dalam menjalankan sebuah partnership atau kemitraan. Hal ini dikarenakan, dengan adanya jalinan kemitraan, maka tujuan dari masing-masing lembaga akan tercapai dengan mudah.
3. *Coordination*: Proses dan upaya perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera merupakan realitas yang selalu dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Realitas itu apabila dicermati mengandung beberapa unsur dasar. Beberapa unsur dasar tersebut apabila direkonstruksi akan menjadi sosok yang utuh yang menggambarkan realitas tersebut. Sosok dari realitas tersebut adalah proses perubahan yang bersifat multidimensi menuju kondisi semakin terwujudnya hubungan yang serasi antara *needs* dan *resources* melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk 13 mengembangkan dirinya terutama dalam memanfaatkan peluang dan sumber daya, mengantisipasi tantangan dan menangani masalah sosial yang muncul, sehingga terwujud kondisi kehidupan yang semakin sejahtera (Soetomo, 2009:38).
4. *Willingness*: ungkapan untuk mengekspresikan suatu kesediaan dan kesiapan untuk melakukan sesuatu
5. *Trust*: Dalam kemitraan, syarat utamanya adalah bahwa masyarakat harus memiliki sifat yang mengakar, dan untuk pihak lain harus responsif dan adaptif terhadap pembaruan yang sedang berjalan. Sifat mengakar apabila

institusi tersebut diakui, dihargai, dirasakan manfaatnya dan dijadikan orientasi dalam tindakan bersama.

6. *Capability*: Mengacu pada kemampuan lembaga untuk memberdayakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan.

2.1.2 Teori Literasi

2.1.2.1 Pengertian Literasi

Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa.

Dalam bahasa Latin, istilah literasi disebut sebagai *literatorus*, artinya adalah orang yang belajar. Selanjutnya, National Institut for Literacy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.

Education Development Center (EDC) juga turut menjabarkan pengertian dari literasi, yakni kemampuan individu menggunakan potensi yang dimilikinya, dan tidak sebatas kemampuan baca tulis saja. UNESCO juga menjelaskan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya.

Menurut UNESCO, pemahaman seseorang mengenai literasi ini akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya serta pengalaman. Kemudian, di dalam kamus online Merriam – Webster, dijelaskan bahwa literasi adalah kemampuan atau kualitas melek aksara dimana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis dan mengenali serta memahami ide-ide secara visual.

Kern (2000: 3) menjelaskan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Selain itu literasi juga memiliki kesamaan arti dengan belajar dan memahami sumber bacaan.

Romdhoni (2013: 90) menyatakan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan-keterampilan tertentu, yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kern (2000: 16) yang mendefinisikan :
“literasi secara lebih komprehensif sebagai berikut: *Literacy is the use of socially, historically, and culturally-situated practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the relationship between textual conventions and their contexts of use and, ideally, the ability to reflect critically on those relationships. Because it is purposesensitive, literacy is dynamic-not static-and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge.* (Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, dan situasi kebudayaan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antar konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/tujuan, literasi itu bersifat dinamis-tidak statis- dan dapat bervariasi diantara dan didalam komunitas dan kebudayaan. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kebudayaan).”

Senada dengan itu (Iriantara, 2009) menjelaskan bahwa kini literasi bukan hanya berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis teks saja, karena kini “teks” sudah diperluas maknanya sehingga mencakup juga “teks” dalam bentuk visual, audiovisual dan dimensi-dimensi komputerisasi, sehingga di dalam “teks” tersebut secara bersama-sama muncul unsur-unsur kognitif, afektif, dan intuitif.

2.1.2.2 Jenis-jenis Literasi

Menurut UNESCO yang dikutip oleh (Nasution, 2013) memasukkan enam kategori kelangsungan hidup kemampuan literasi abad 21 yang terdiri dari:

1. *Basic Literacy*, kadang-kadang disebut Literasi Fungsional (*Functional Literacy*), merupakan kemampuan dasar literasi atau sistem belajar konvensional seperti bagaimana membaca, menulis, dan melakukan perhitungan numerik dan mengoperasikan sehingga setiap individu dapat berfungsi dan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi di masyarakat, di rumah, di kantor maupun sekolah.
2. *Computer literacy*, merupakan seperangkat keterampilan, sikap dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan mengoperasikan fungsi dasar teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perangkat dan alat-alat seperti komputer pribadi (PC), laptop, ponsel, iPod, *BlackBerry*, dan sebagainya, literasi komputer biasanya dibagi menjadi hardware dan software literasi.
3. *Media Literacy*, merupakan seperangkat keterampilan, sikap dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan memanfaatkan berbagai jenis media dan format di mana informasi di komunikasikan dari pengirim ke penerima, seperti gambar, suara, dan video, dan apakah sebagai transaksi antara individu, atau sebagai transaksi massal antara pengirim tunggal dan banyak penerima, atau, sebaliknya.
4. *Distance Learning* dan *E-Learning* adalah istilah yang merujuk pada modalitas pendidikan dan pelatihan yang menggunakan jaringan telekomunikasi, khususnya *world wide web* dan internet, sebagai ruang kelas virtual bukan ruang kelas fisik. Dalam *distance learning* dan *elearning*, baik guru dan siswa berinteraksi secara online, sehingga siswa dapat menyelesaikan penelitian dan tugas dari rumah, atau di mana saja di mana mereka dapat memperoleh akses ke komputer dan saluran telepon.
5. *Cultural Literacy*. Merupakan literasi budaya yang berarti pengetahuan, dan pemahaman, tentang bagaimana suatu negara, agama, sebuah kelompok etnis atau suatu suku, keyakinan, simbol, perayaan, dan cara

komunikasi tradisional, penciptaan, penyimpanan, penanganan, komunikasi, pelestarian dan pengarsipan data, informasi dan pengetahuan, menggunakan teknologi. Sebuah elemen penting dari pemahaman literasi informasi adalah kesadaran tentang bagaimana faktor budaya berdampak secara positif maupun negatif dalam hal penggunaan informasi modern dan teknologi komunikasi

6. *Information literacy*, erat kaitannya dengan pembelajaran untuk belajar, dan berpikir kritis, yang menjadi tujuan pendidikan formal, tapi sering tidak terintegrasi ke dalam kurikulum, silabus dan rencana pelajaran, kadang-kadang di beberapa negara lebih sering menggunakan istilah *information competencies* atau *information fluency* atau bahkan istilah lain.

2.1.2.3 Prinsip Pendidikan Literasi

Menurut Kern (2000) terdapat tujuh prinsip pendidikan literasi, yaitu:

1. Literasi melibatkan interpretasi Penulis/ pembicara dan pembaca/ pendengar berpartisipasi dalam tindak interpretasi, yakni: penulis/ pembicara menginterpretasikan dunia (peristiwa, pengalaman, gagasan, perasaan, dan lain-lain), dan pembaca/ pendengar kemudian menginterpretasikan interpretasi penulis/ pembicara dalam bentuk konsepsinya sendiri tentang dunia.
2. Literasi melibatkan kolaborasi Terdapat kerjasama antara dua pihak yakni penulis/ pembicara dan pembaca/ pendengar. Kerjasama yang dimaksud itu dalam upaya mencapai suatu pemahaman bersama. Penulis/ pembicara memutuskan apa yang harus ditulis/ dikatakan atau yang tidak perlu ditulis/ dikatakan berdasarkan pemahaman mereka terhadap pembaca/ pendengarnya. Sementara pembaca/ pendengar mencurahkan motivasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka agar dapat membuat teks penulis bermakna.
3. Literasi melibatkan konvensi Orang-orang membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara itu ditentukan oleh konvensi/ kesepakatan

kultural (tidak universal) yang berkembang melalui penggunaan dan dimodifikasi untuk tujuan-tujuan individual. Konvensi disini mencakup aturan-aturan bahasa baik lisan maupun tertulis.

4. Literasi melibatkan pengetahuan kultural. Membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara berfungsi dalam sistem-sistem sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita, dan nilai tertentu. Sehingga orang-orang yang berada di luar suatu sistem budaya itu rentan/beresiko salah dipahami oleh orang-orang yang berada dalam sistem budaya tersebut.
5. Literasi melibatkan pemecahan masalah. Karena kata-kata selalu melekat pada konteks linguistik dan situasi yang melingkupinya, maka tindak menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu melibatkan upaya membayangkan hubungan-hubungan di antara katakata, frase-frase, kalimat-kalimat, unit-unit makna, teks-teks, dan duniadunia. Upaya membayangkan/ memikirkan/ mempertimbangkan ini merupakan suatu bentuk pemecahan masalah.
6. Literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri. Pembaca/ pendengar dan penulis/ pembicara memikirkan bahasa dan hubungan-hubungannya dengan dunia dan diri mereka sendiri. Setelah mereka berada dalam situasi komunikasi mereka memikirkan apa yang telah mereka katakan, bagaimana mengatakannya, dan mengapa mengatakan hal tersebut.
7. Literasi melibatkan penggunaan bahasa. Literasi tidaklah sebatas pada sistem-sistem bahasa (lisan/ tertulis) melainkan mensyaratkan pengetahuan tentang bagaimana bahasa itu digunakan baik dalam konteks lisan maupun tertulis untuk menciptakan sebuah wacana/ diskursus. Dari poin diatas maka prinsip pendidikan literasi adalah literasi melibatkan interpretasi, kolaborasi, konversi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi diri, dan melibatkan penggunaan bahasa.

2.1.2.4 Konsep Dasar Literasi

Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang

mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf. Pengertian literasi selanjutnya berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Sejalan dengan perjalanan waktu, definisi literasi telah bergeser dari pengertian yang sempit menuju pengertian yang lebih luas mencakup berbagai bidang penting lainnya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor perluasan maka akibat semakin luas penggunaannya, perkembangan teknologi informasi dan teknologi, maupun perubahan analogi. Jika diselidik secara komprehensif, perubahan konsepsi literasi ini telah terjadi minimalnya dalam lima generasi.

Pada masa perkembangan awal, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Hal ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan untuk membuat makna. Literasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya, dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. Literasi berfungsi untuk menghubungkan individu dan masyarakat, serta merupakan alat penting bagi individu untuk tumbuh dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis.

Perkembangan kedua konsepsi literasi dicirikan oleh sejumlah pandangan yang menyatakan bahwa literasi berkaitan erat dengan situasi dan praktik sosial. Pandangan ini mendefinisikan literasi sebagai praktik sosial dan budaya ketimbang dipandang sebagai prestasi kognitif yang bebas konteks. Literasi lebih lanjut dipandang sebagai keyakinan budaya dan habitualnya. Pandangan ini lahir berdasarkan sudut pandang para ahli yang menafsirkan dan menghubungkan literasi dengan konteks dunia. Perubahan ini memainkan peran penting dalam proses pengembangan kemampuan literasi siswa dan pendekatan yang digunakan siswa untuk mempelajari berbagai bidang akademik.

2.1.2.5 Tujuan Literasi

Berikut ini adalah beberapa tujuan dari literasi, antara lain adalah :

1. Menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik.

2. Dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat.
3. Dapat juga meningkatkan pemahaman seseorang didalam mengambil inti sari dari suatu bacaan.
4. Mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna.
5. Memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang.
6. Memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis.

2.1.2.6 Manfaat Literasi

Adapun manfaat dari sebuah literasi, antara lain adalah :

1. Menambah kosa kata.
2. Dapat menstimulasi mental.
3. Mengoptimalkan kerja otak.
4. Menambah wawasan dan informasi baru.
5. Meningkatkan kualitas memori.
6. Mengembangkan kemampuan verbal.
7. Melatih kemampuan berfikir dan menganalisa.
8. Meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang.
9. Melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna.
10. Melatih keterampilan untuk berfikir dan menganalisa.

2.1.2.7 Pendidikan Literasi dalam Kerangka Pendidikan Sepanjang Hayat

Dalam prakteknya di masyarakat, semua orang melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Ada yang melakukannya karena warisan orang tua dan budaya secara turun temurun. Ada yang belajar karena direncanakan secara sengaja untuk meningkatkan kemampuan diri sesuai dengan tuntutan zaman; ada pula yang melakukannya karena otodidak. Orang bertanya tentang sesuatu hal kepada orang lain; atau orang mencari informasi dan sumber-sumber informasi mengenai cara-cara berwirausaha secara lebih baik; atau orang secara sengaja melakukan percobaan memelihara ayam seni adu untuk tujuan usaha; adalah contoh-contoh belajar dalam praktek yang dilakukan oleh manusia di banyak aspek kehidupan sehari-hari. Mereka melakukan proses pembelajaran.

Terkait dengan paparan di atas, sebagai lembaga yang salah satu tugasnya adalah meliterasikan masyarakat melalui membaca dan belajar, seperti yang tercantum dalam pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, yakni:

1. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;
2. Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas;
3. Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
4. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. Makna dari konteks di atas menggambarkan bahwa pendekatan literasi informasi melalui membaca dan belajar sepanjang hayat, terus dilakukan baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang lebih besar. Dalam Sektor pendidikan formal maupun nonformal, di institusi layanan publik, dan institusi perpustakaan di semua jenis dan tingkatan, praktek pendidikan literasi informasi banyak dilakukan, baik langsung ataupun tidak langsung.

Secara umum, istilah literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis huruf Latin kalau di Indonesia. Kebalikannya adalah *illiterate* yang diindonesiakan menjadi buta huruf atau buta aksara, maksudnya aksara Latin seperti yang sedang Anda baca ini, sebab meskipun seseorang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf lain seperti Arab, misalnya, tetap dikatakan sebagai buta huruf atau buta aksara. Indonesia sudah menetapkan bahwa huruf yang digunakan sebagai alat komunikasi pendidikan dan yang diberlakukan secara nasional adalah huruf Latin ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, di hampir seluruh dunia, penggunaan aksara Latin ini digunakan dalam banyak hal. (Lihat Yusup (2010). Secara khusus istilah literasi bisa didefinisikan sebagai

kemampuan teknis dalam men-decode atau mereproduksi lambang-lambang tulisan, hasil cetakan, atau tulisan dalam kalimat dan kata-kata dalam bentuk lambang tulisan. (Graff, 2006, dalam Microsoft Encarta Dictionary, 2007).

Dalam perkembangan selanjutnya literasi dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi secara tertulis, bukan bahasa dan komunikasi lisan. Sekarang konsep literasi juga sudah digunakan secara lebih bervariasi dalam konteks kemampuan memahami perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer dengan segala perangkat fungsionalnya, baik dari sisi hardware maupun software-nya. Kemampuan menggunakan komputer di zaman sekarang semakin dibutuhkan karena aspek kemanfaatannya yang demikian banyak. Grafik, matematik, data, informasi, dan belakangan pengetahuan, sekarang sudah bisa diolah dengan bantuan sistem komputer.

Literasi bukan sebuah karakteristik manusia sejak lahir, bukan unsur dasar kemampuan manusia, namun lebih merupakan kemampuan yang bisa dipelajari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Bahkan dalam perkembangan teakhir, ada kecenderungan literasi digunakan sebagai kemampuan dalam berinteraksi seseorang dan masyarakat dengan lingkungannya, dengan budayanya, dengan bisnisnya, dengan politiknya. Literasi tidak cocok digunakan secara sendirian tanpa konteks

Beberapa contoh seperti literasi sosial, literasi pergaulan, literasi hukum, literasi teknologi, literasi penghidupan, pengetahuan lokal, dsb. Kampanye literasi sebenarnya sudah dicanangkan oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) sebagai organisasi dunia, yang menunjukkan angka literasi naik (tumbuh) dari sekitar 60 persen pada tahun 1970, menjadi 77,4 persen pada tahun 1995. Meskipun demikian, angka illiteracy (buta aksara) pun meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dunia. Badan dunia ini pun memperkirakan bahwa pada tahun 1995, lebih dari 885 juta penduduk dunia tidak memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Apalagi jika yang dimaksudkannya adalah illiteracy fungsional. (Graff, 2006, dalam Microsoft Encarta Dictionary, 2007). Kondisi Indonesia dianggap lebih parah lagi angka

literasinya. Penelitian dari Unesco (2012) menggambarkan bahwa: literasi Indonesia menempati urutan 64 dari 65 negara. Tingkat membaca siswa Indonesia menempati urutan ke 57 dari 65 negara (PISA, 2010). Indeks minat baca menunjukkan angka 0,001; artinya setiap 1.000 penduduk hanya satu yang membaca. Tingkat melek huruf orang dewasa menempati posisi 65,5%. (Aminah, 2014).

Program-program pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi panel, kuliah klasikal, dsb., itu pada dasarnya adalah program untuk meningkatkan literasi, termasuk literasi informasi dan media. Program-program tadi berusaha meningkatkan angka literasi di semua tingkatan masyarakat, dari mulai mengubah kemampuan teknis anggota masyarakat pada tingkat yang paling dasar, misalnya masyarakat yang masih tergolong buta huruf (illiterate), sampai meningkatkan kemampuan anggota masyarakat yang sudah memiliki kemampuan dasar literasi, hingga sampai kepada kondisi masyarakat yang betul-betul memahami dan memiliki kemampuan menggunakan beragam media komunikasi dan informasi untuk kepentingan kehidupan dan penghidupannya. Tugas-tugas ini dilakukan oleh perpustakaan sepanjang perjalanannya. Melalui penyediaan informasi dan sumber-sumber informasi termasuk media sebagai pembawa pesan informasi dimaksud, yang isinya sesuai dengan kebutuhan segenap anggota masyarakat di semua tingkatan, perpustakaan sudah ikut ambil bagian dalam program literasi informasi. Tugas selanjutnya adalah secara proaktif melaksanakan program-program literasi informasi dan literasi media secara berkesinambungan kepada kelompok masyarakat di semua tingkatan dan usia, sehingga dalam praktiknya perpustakaan bisa berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran sepanjang hayat.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan informasi yang semakin berkembang dan kompleks, kita memerlukan adanya literasi informasi sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Dengan melihat perkembangan informasi dalam berbagai konteks kehidupan manusia yang demikian kompleks, maka pada kenyataannya, manusia itu terus menerus belajar. Mereka setiap saat berfikir untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, mereka juga secara terus-

menerus berusaha mendapatkan tambahan keterampilan secara lebih baik. Literasi informasi dalam proses *lifelong learning* sebenarnya melekat dengan karakter manusia yang mayoritas sebagai makhluk pembelajar. Manusia melakukan proses belajar secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas diri agar bisa bersaing dalam menghadapi tantangan global.

Pada pertemuan Alexandria Proclamation yang diadakan di Mesir pada 6—9 November 2005, disepakati beberapa kemampuan yang merupakan inti pembelajaran sepanjang hayat dan merupakan dasar pada era digital seperti saat ini. Kesepakatan tersebut berupa:

1. Kemampuan *basic* dalam menentukan kebutuhan informasi, menempatkan, mengevaluasi, membuat, dan menerapkan informasi dalam konteks budaya dan sosial;
2. Sebagai kunci dan pedoman seseorang dalam mengakses informasi secara efektif serta penggunaan dan pembuatan konten dalam mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan manusia, dan aspek lainnya (Garner, 2006);
3. Kemampuan dasar dalam mempelajari teknologi informasi. Hasil dari pertemuan di Mesir pada 6—9 November 2005 tersebut menjadikan literasi informasi menempati posisi yang sangat penting karena kemampuan itu sangat penting. Jika seseorang memahami teknologi informasi, maka semakin mudah seseorang memenuhi kebutuhannya.

Menurut American Library Association (ALA), literasi informasi ialah salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki setiap orang dan berkontribusi dalam mencapai pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Kompetensi literasi informasi bukan hanya sekadar pengetahuan di kelas formal, tetapi juga praktik yang melekat pada individu masing-masing orang dalam lingkungan masyarakat. Literasi informasi juga sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan manusia dan berlangsung seumur hidup. Disamping itu

memberikan pembelajaran mengenai kemampuan literasi merupakan hal yang sangat penting.

Maka dari itu urgensi dari literasi informasi proses pembelajaran seumur hidup bisa menjadi bekal seseorang dalam mencari informasi, bukan hanya di dunia akademik tapi juga dalam lingkungan masyarakat. Dengan seseorang yang sudah bisa dikatakan literat seperti yang disampaikan diatas, maka seseorang tersebut akan bisa bersaing dalam era saat ini dan mereka dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan cepat dan tepat sehingga taraf hidup mereka bisa meningkat.

2.1.3 Teori Taman Baca Masyarakat

Taman baca masyarakat merupakan sebuah ruang publik yang ditujukan untuk menjadikan masyarakat lebih cerdas. Dengan berkembangnya zaman, masyarakat dituntut untuk lebih mengetahui perubahan yang terjadi, salah satunya melalui sebuah karya tulis atau buku.

Namun pada kenyataannya kebanyakan masyarakat enggan menaruh perhatian pada sebuah buku untuk mengetahui perkembangan yang terjadi. Maka dari itu peran sebuah taman baca masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan sebuah kepekaan terhadap buku atau sumber bacaan yang menyediakan informasi.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa peran taman baca masyarakat dalam upaya penyebaran informasi sangat signifikan, karena dengan adanya hal tersebut akan berpengaruh pada sukses atau tidaknya sebuah program literasi di suatu daerah. Berbicara tentang taman baca masyarakat yang lebih sering di sebut perpustakaan keduanya memiliki konsep yang hampir sama namun memiliki ruang lingkup yang berbeda. Taman baca masyarakat memiliki lingkup yang lebih luas dari perpustakaan karena taman baca masyarakat bukan hanya tempat membaca dan meminjam buku namun lebih luas pada komunitas, diskusi, dan program-program lainnya yang dapat menyukseskan program literasi. Berbeda dengan perpustakaan yang disediakan oleh lembaga yang ditujukan kepada masyarakat untuk membaca dan meminjam buku.

Berdasarkan UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada pasal 2 menyebutkan: "*Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran*

sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan". Kemudian Pasal 3 menyebutkan: "Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa".

Dalam Undang-Undang tersebut diatas, istilah TBM maupun Perpustakaan Komunitas sama-sama tidak dijelaskan, tetapi pada pasal 25 UU No.43 tahun 2007, menyebutkan adanya Perpustakaan Khusus, yang berbunyi: "*pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan / atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus*".

Menurut Muhsin kalida (2014) TBM adalah sebuah lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk bahan bacaan dan bahan pustaka lainnya. Jika perpustakaan dikelola oleh pustakawan, maka pengelola TBM adalah masyarakat yang dipercaya atau memiliki niat berpartisipasi untuk memberikan layanan kebutuhan masyarakat akan informasi dan ilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan pelayanan dan keterampilan teknis penyelenggaraannya. Perpustakaan dan masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena perpustakaan adalah produk manusia. Begitu juga terkait dengan perkembangan perpustakaan juga tidak terlepas dari sejarah perkembangan manusia.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa taman baca masyarakat bukan hanya sebagai wadah untuk membaca buku namun juga dijadikan sebagai pusat informasi dan penyebaran literasi dengan meningkatnya minat baca dan kepedulian masyarakat terhadap buku.

Menurut Sutarno (2006 : 19) Taman Baca Masyarakat mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangunnya, mengelola dan mengembangkannya. Dalam hal ini perlu dikembangkan rasa untuk ikut memiliki (*sense of belongin*), ikut bertanggung jawab (*sense of responsibility*) dan ikut memelihara (*to take care of*). TBM adalah suatu lembaga/tempat yang menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan sebagai tempat penyelenggara program pembinaan kemampuan membaca dan belajar masyarakat, (Kusnadi, 2005). Diselenggarakannya taman bacaan selain untuk mewujudkan

masyarakat gemar membaca, juga dimaksudkan untuk mendukung pendidikan keaksaraan. (Depdiknas, 2005)

Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) telah dimulai sejak tahun 1992/1993. Kehadiran TBM merupakan pembaharuan dari Taman Pustaka Rakyat (TPR) yang didirikan oleh Pendidikan Masyarakat pada tahun limapuluhan. Program TBM ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat. Oleh karena itu keberadaan TBM sangat penting sebagai sarana belajar masyarakat. Untuk itu kemampuan, keterampilan dan kinerja pengelola harus ditingkatkan sehingga dapat mengelola TBM.

2.1.3.1 Hakikat dan prinsip Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pendidikan menurut KBBI diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan tidak hanya didapatkan melalui sekolah formal namun juga bisa didapatkan dari pendidikan nonformal, salah satunya dari Taman Baca Masyarakat.

Menurut Mustofa Kamil dalam buku *Pendidikan Nonformal* (2009), menyebutkan TBM sebagai salah satu program pendidikan nonformal sebagai *modes of learning*, memberikan akses pendidikan dan belajar lebih luas kepada warga masyarakat yang ingin belajar. Oleh karena itu warga belajar berpeluang memiliki daya jual (*adaptability*), daya-lentur (*flexibility*) kapasitas inovatif dan *entrepreneurial attitudes and aptitudes*. Sehingga warga belajar tertantang mencari dan memperkuat *basic knowledge and competences, curiosity and motivations, critical and creative behavior untuk menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan dirinya lebih mapan to know how to learn, how to be, and know how to become*, a) Belajar berakhlak mulia, b) Belajar untuk memahami, c) Belajar untuk berbuat, d) Belajar hidup dalam kebersamaan, dan e) Belajar mewujudkan jati dirinya.

Sebuah studi yang dilakukan oleh tim dari Perpustakaan Nasional RI terhadap TBM (2010), mengungkapkan bahwa TBM itu merupakan sesuatu yang unik dan menarik. Dari studi tersebut, TBM memiliki daya tarik, terutama terhadap lima hal a) Pelayanan yang ramah sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk

memanfaatkan taman bacaan, b) Bahan bacaan yang beragam, semakin banyak ragam bacaan, semakin banyak masyarakat yang berminat untuk datang ke taman bacaan, diantaranya agama, komik, dan keterampilan, c) Tempat sederhana sehingga membuat masyarakat lebih akrab, yang penting bersih dan cukup luas, d) Koleksi terus diperbaharui; e) bahan bacaan bersifat populer, tidak terlalu serius, dan disertai dengan ilustrasi gambar.

Pada hakekatnya munculnya TBM, merupakan jawaban kebutuhan masyarakat. Ada empat hal yang menjadi pertimbangan munculnya TBM, yaitu; a) Merupakan perwujudan pendidikan sepanjang hayat, b) Mendorong peningkatan minat baca masyarakat, c) Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan sikap peserta didik dengan cara otodidak, d) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat terpenuhi pada satuan-satuan pendidikan.

Sedangkan pentingnya TBM dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, ada enam poin pokok, yaitu: a) Masyarakat membutuhkan Informasi, b) Masyarakat Membutuhkan Belajar Mandiri, c) Masyarakat Membutuhkan Pemecahan Masalah, d) Masyarakat Membutuhkan Hiburan yang Mendidik, e) Memperkuat Kemampuan Keaksaraan, dan f) Masyarakat Ingin Berdaya.

Menurut Yuyu Yulia, dalam bukunya Pengembangan Koleksi (2009), prinsip taman bacaan masyarakat (TBM) selain sebagai salah satu program satuan pendidikan nonformal juga sebagai pusat informasi yang mempunyai banyak fungsi, diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat pembaca / pemustaka / peserta didik. Sedangkan menurut Sutarno NS, dalam bukunya Perpustakaan dan Masyarakat, menyebutkan perpustakaan masyarakat pada prinsipnya mempunyai tiga kegiatan pokok, yaitu: a) Mengumpulkan (*to collect*) semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan, misi lembaga dan masyarakat yang dilayaninya, b) Melestarikan, memelihara dan merawat (*topreserve*), seluruh koleksinya agar tetap dalam keadaan baik, utuh, layak pakai dan tidak lekas rusak baik karena pemakaian maupun karena usianya, c) Menyediakan koleksi untuk siap dipergunakan dan diberdayakan (*to make available*) seluruh sumber informasi dan koleksi yang dimiliki oleh TBM bagi para pemanfaat (warga masyarakat sebagai pengguna).

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa TBM memiliki peranan penting dalam proses pembentukan dan pembangunan masyarakat literat. karena taman baca masyarakat bersifat fleksibel sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat atau siapapun yang ingin mencari dan menggali informasi demi terciptanya pembangunan masyarakat.

2.1.3.2 Tujuan dan Sarana Taman Bacaan Masyarakat

Selain memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga penyedia informasi, pelayanan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ditujukan bagi semua masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, kemampuan berfikir dan keterampilan melalui sumber-sumber informasi yang telah disediakan.

Oleh karena itu TBM juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menjadi sebuah wadah kegiatann belajar masyarakat.
3. Mendukung peningkatan kemampuan aksarawan baru.
4. Memberantas buta aksara sehingga tidak menjadi buta aksara

Dalam Petunjuk Teknis TBM (2010:10) Adapun sasaran pengguna TBM adalah :

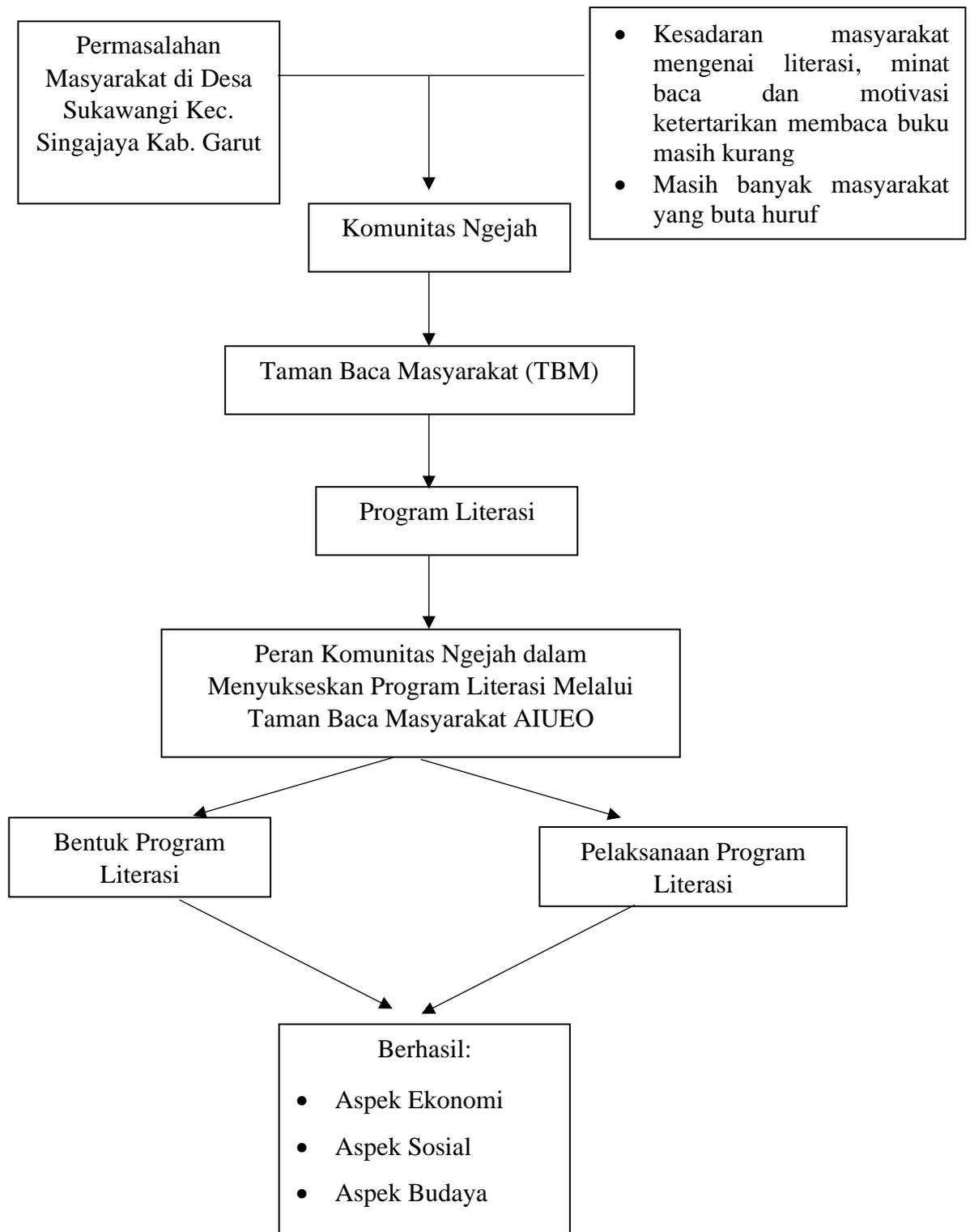
1. Warga belajar Pendidikan keaksaraan baik yang telah menyelesaikan program keaksaraan dasar atau yang saat ini sedang belajar di program Keakasaraan Usaha Manpembangunan diri.
2. Masyarakat yang sedang belajar di program PNFI
3. Masyarakat umum baik yang berkepentingan maupun tidak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir merupakan alat berpikir peneliti dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil rumusan masalah mengenai peran komunitas ngejah dalam menyukkseskan program literasi melalui TBM AIUEO. Hal tersebut dikarenakan penulis menganggap bahwa gerakan komunitas ngejah yang dituangkan dalam program-program mengenai kajian literasi sangat menarik dan penting untuk diketahui dan dikaji lebih dalam.

Dengan adanya penelitian ini penulis bermaksud untuk menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana komunitas ngejah menyukkseskan program literasi di Kabupaten Garut melalui Taman Baca Masyarakat AIUEO.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Yang Relevan

1. Fajrianti Ali (2017) dengan judul Efektifitas Taman Baca Terhadap Penguatan Budaya Literasi. Diperoleh hasil penelitian menunjukkan (1) Upaya penguatan budaya literasi di SMA Negeri 10 Makassar nyata sudah diterapkan. Ditandai dengan adanya fasilitas yang mendorong tumbuhnya minat baca peserta didik seperti kursi dan meja yang memadai, koleksi buku, rak buku, pelayanan dan sebagainya. (2) Taman Baca di SMA Negeri 10 Makassar telah efektif mendorong minat baca peserta didik terutama pada jam istirahat. Dalam mengaktifkan peserta didik, diadakan kegiatan-kegiatan sekolah di taman baca seperti bedah buku, karya tulis ilmiah, mapping dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang bertujuan mendorong peserta didik lebih kreatif, inovatif dan menghasilkan karya serta memiliki pengetahuan yang luas melalui taman baca dan budaya literasi di SMA Negeri 10 Makassar secara umum.
2. Ludfia (2015) dengan judul Upaya Pembinaan Minat Baca di Taman Baca Masyarakat Studi Kasus TBM Sanggar Baca Jendela Dunia dan TBM Jendela Ilmu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat minat baca. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya pembinaan minat baca di TBM SBJD dan TBM JI adalah menyelenggarakan pentas seni, membuat mading, membaca buku selama 15 menit kemudian membuat ringkasan, mensirkulasi buku selama satu minggu sekali dengan tema yang berbeda, menyelenggarakan kelas pekerjaan tangan, lomba memasak, memutar foto atau video dan *story telling*. Kendala yang dialami dalam penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi, perkembangan teknologi informasi, kurangnya dukungan dan kerjasama pemerintah, rendahnya sikap dan minat anak-anak terhadap bahan bacaan dan ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak.

3. Kania Rianti (2010) dengan judul Peningkatan Minat Baca Anak Melalui Mendongeng. Studi Kasus di Perpustakaan Rawamangun. Penelitian ini membahas peningkatan minat baca anak melalui mendongeng. Metode yang digunakan adalah studi kasus dibatasi pada kelompok anak yang merupakan anggota Perpustakaan Pustaka Kelana untuk meningkatkan minat baca anak melalui kegiatan mendongeng di perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, anak yang gemar mendengarkan dongeng memiliki minat baca yang cukup baik, sehingga kegiatan mendongeng harus terus dilakukan dan dikembangkan secara rutin di perpustakaan.
4. Juniawan Hidayanto (2013) Dengan judul penelitian “Upaya Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Melalui Taman Bacaan Masyarakat Area Publik di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini: (1) Upaya yang dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat dengan melakukan berbagai upaya yang antara lain dengan melakukan berbagai kegiatan literasi dan usaha kreatif;(2) Kendala yang dialami antara lain kurangnya pendampingan dan ruang atau tempat tempat menyimpan buku yang kurang luas;(3) Solusi dalam meminimalisir kendala dengan melakukan berbagai kegiatan dan usaha produktif sehingga masyarakat lebih sering dan tidak canggung dalam menggunakan layanan TBM Area Publik.
5. Octroaca Cempaka Jene (2013) Dengan Judul Peran Taman Bacaan Masyarakat dalam Menumbuhkan Budaya Baca Anak di Taman Bacaan Masyarakat Mortir Banyumanik Semarang. Hasil penelitiannya adalah diketahui bahwa upaya Taman Baca Masyarakat Mortir dalam menumbuhkan budaya baca anak yaitu melalui penyediaan koleksi bahan bacaan dan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti *story telling*, lomba puisi dan kegiatan belajar di TBM.

